

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara produsen sekaligus konsumen minyak kelapa sawit. Tingginya tingkat konsumsi dan juga produksi minyak kelapa sawit di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu industri unggulan di Indonesia. Industri minyak kelapa sawit ini telah berkontribusi pada devisa negara, PDB, pembukaan lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Ekspor dari industri minyak kelapa sawit dikirim ke beberapa tujuan utama. Salah satu pasar tujuan utama dari minyak kelapa sawit Indonesia adalah Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang cukup banyak mengonsumsi minyak kelapa sawit untuk berbagai kebutuhan. Namun, 16 Mei 2023 lalu Uni Eropa mengadopsi sebuah kebijakan yaitu EUDR. EUDR memiliki serangkaian peraturan uji tuntas yang menargetkan segala bentuk produk jika ingin diperjualbelikan dalam pasar Uni Eropa. EUDR memiliki skema uji tuntas hingga mitigasi risiko yang dapat memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam pasar Uni Eropa tidak berkontribusi pada deforestasi maupun degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Terdapat setidaknya 7 komoditas yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Salah satu komoditas yang terdampak kebijakan EUDR adalah kelapa sawit.

Dalam proses mematuhi rangkaian uji tuntas dalam EUDR, operator maupun pedagang baik dalam maupun luar kawasan Uni Eropa harus menyertakan berbagai bukti yang menyatakan bahwa produk tersebut bebas dari kegiatan deforestasi maupun degradasi hutan. Tidak menutup kemungkinan bahwa harus adanya koordinasi yang berlapis untuk bagi para operator dan pedagang dalam berbagi informasi yang berkontribusi pada rantai pasokan produknya masing-masing. Validasi dari pihak ke-3 juga memiliki potensi untuk dilibatkan agar menentukan bahwa persyaratan yang telah dikumpulkan menandakan bahwa produk tersebut layak diperjualbelikan dalam pasar Uni Eropa.

Pasar Uni Eropa yang merupakan pasar ke-3 terbesar dalam urutan tujuan pasar utama minyak kelapa sawit Indonesia dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Sehingga ketika Indonesia dihadapi dengan inisiasi EUDR, maka para pelaku usaha cenderung memberikan suara dan masukan kepada para pemerintah untuk tetap mempertahankan pasar tersebut dengan keringanan prosedur yang disesuaikan. Hal tersebut yang menjadi landasan dari rumusan masalah penulis untuk mengetahui sekiranya bentuk diplomasi apa saja yang akan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mempertahankan ekspor minyak kelapa sawitnya ke pasar Uni Eropa.

Rumusan masalah penulis terjawab melalui beberapa hasil temuan. Rata-rata diplomasi dilakukan Indonesia setelah diadopsinya EUDR sebagai sebuah peraturan oleh Uni Eropa yaitu sejak awal tahun 2023 hingga tahun 2024 ini. Bentuk diplomasi yang penulis dapatkan dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu lobi dan negosiasi, pengiriman representatif, dan juga pertemuan antar *stakeholder*. Upaya dalam bentuk lobi dan negosiasi dilakukan pemerintah dengan cara bersurat langsung kepada perwakilan yang ada di Uni Eropa, inisiasi *Joint Task Force (JTF)* dengan Malaysia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan juga inisiasi *joint letter*. Bentuk diplomasi lobi dan negosiasi ini terbatas pada partisipan yang berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung seperti perwakilan dari kementerian dan juga perwakilan dari para pelaku usaha. Lobi dan negosiasi dalam bentuk JTF masih berlanjut hingga saat ini dan cukup efektif untuk menjadi wadah bagi pihak Uni Eropa dengan negara produsen saling mengerti keberatan dari masing-masing pihak setelah adanya inisiasi EUDR.

Selanjutnya, ada beberapa upaya diplomasi dalam bentuk pengiriman representatif yang dilakukan oleh Indonesia. Mayoritas diantaranya berupa pertemuan bilateral yang dilakukan di Jakarta maupun di negara-negara Uni Eropa. Melalui pertemuan bilateral tersebut, Indonesia tidak pernah secara khusus hanya membahas mengenai pandangannya terhadap EUDR namun selalu mengupayakan untuk menyampaikan di sela-sela pembicaraan

dengan berbagai topik lain. Bentuk diplomasi lain adalah pertemuan antar *stakeholder*. Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan, bentuk diplomasi ini cenderung lebih beragam dalam hal partisipan. Cukup banyak lapisan masyarakat yang diikutsertakan seperti akademisi, NGO, hingga praktisi lingkungan. Dalam bentuk diplomasi pertemuan antar *stakeholder*, Indonesia sering kali memanfaatkan sebuah konferensi internasional atau forum internasional untuk sedikitnya menyampaikan posisi dan pandangannya terhadap EUDR. Beberapa diantara contoh kegiatan terkait adalah *Epistemic Community and Market Forum (ECMF)* dan juga *Technical Barriers to Trade World Trade Organizations (TBT WTO)*.

Namun, Penelitian ini menghadapi keterbatasan informasi terkait bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit setelah inisiasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh kurangnya data yang dapat diperoleh dari instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Banyak perkembangan yang relevan masih dalam tahap proses dan belum dapat dipublikasikan atau diungkapkan melalui wawancara, karena sifatnya yang dinamis dan belum dapat diakses oleh publik. Hal ini mempengaruhi keterpahaman terhadap dinamika diplomasi ekonomi yang sedang berlangsung dan berpotensi memengaruhi hasil penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan sejak adanya inisiasi EUDR, Indonesia cenderung memfokuskan upaya untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah harapan dari para pengusaha sawit terkait upaya mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa. Alih-alih menentang dengan melaporkan dugaan hambatan non-tarif pada kebijakan EUDR, Indonesia cenderung mengupayakan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sejauh ini, bentuk diplomasi Indonesia yang memberikan hasil cukup progresif adalah lobi dan negosiasi dalam wadah JTF. Dengan didengarkannya dan diberikannya solusi atas kekhawatiran Indonesia yang ditimbulkan dari inisiasi EUDR,

maka kepentingan Indonesia untuk dapat mempertahankan ekspor minyak kelapa sawitnya ke pasar Uni Eropa memiliki potensi besar.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Dalam upaya mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pasca inisiasi EUDR, pendekatan teoritis dapat membantu dalam memahami mengapa dan bagaimana upaya tersebut harus dilakukan. Teori pertama yang penulis gunakan yaitu ‘Diplomasi Ekonomi’ dapat dijadikan sebagai acuan dalam merampungkan hasil temuan penulis secara lebih komprehensif. Diplomasi ekonomi dengan segala tujuan dan bentuknya membantu penulis dalam menyampaikan latar belakang serta harapan dari suatu diplomasi dengan lebih spesifik. Dengan demikian penulis dapat menyampaikan apa yang penulis dapatkan terkait diplomasi ekonomi Indonesia pasca inisiasi EUDR dengan lebih terstruktur dan sistematis. Pemahaman mengenai diplomasi ekonomi sangat sesuai untuk para penulis yang ingin menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam meningkatkan maupun mempertahankan sebuah perdagangan internasional.

Selanjutnya, pemahaman mengenai konsep hambatan non-tarif membantu penulis untuk memahami bagaimana suatu kebijakan, dalam hal ini adalah EUDR, mampu menyebabkan hambatan bagi proses perdagangan komoditas yang tidak secara langsung dipengaruhi tarifnya. Melalui pemahaman mengenai hambatan non-tarif ini juga penulis dapat memahami sekiranya apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dengan berlandaskan kepada kekhawatiran para pelaku usaha akan berbagai hal yang ditimbulkan oleh hambatan non-tarif terhadap proses produksi hingga penjualan. Melalui berbagai pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diharapkan akan lebih banyak penulis lainnya yang mengembangkan pendekatan ini untuk berbagai topik lainnya

sehingga dapat menjadi sebuah perkembangan bagi studi diplomasi ekonomi, khususnya terkait Indonesia dan Uni Eropa.

6.2.2 Saran Praktis

Saran praktis penulis terhadap arah diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam upaya mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit untuk Pasar Uni Eropa, yaitu selain berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang ada di seluruh dunia, pemerintah juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan NGO yang berasal dari negara-negara Uni Eropa guna memperkuat posisi Indonesia dalam Diplomasi. Contohnya adalah bekerja sama NGO dari Italia dan Spanyol yang sebelumnya telah menyelaraskan pandangan terkait isu ini melalui forum ECMF dan merupakan negara Uni Eropa yang memiliki hubungan dagang cukup baik dimana masing-masing mengimpor sebanyak lebih dari 50% minyak nabati, khususnya kelapa sawit Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah dengan para pelaku usaha dapat mempertimbangkan peningkatan mutu kelapa sawit dengan tidak hanya memfokusnya pada peningkatan jumlah produksi. Para petani kecil yang rentan terhadap kebijakan EUDR dapat didorong dengan pelatihan dari pemerintah yang bekerja sama dengan para pengusaha minyak kelapa sawit seputar teknis pengelolaan produksi yang berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan para petani kecil tidak menjadi sasaran atau dikecualikan peran dan hasil produksinya karena kebijakan EUDR.

Terakhir, agar dapat berkomitmen dengan baik terhadap persyaratan yang dimuat dalam kebijakan EUDR, Indonesia dapat memanfaatkan wadah JTF untuk bernegosiasi terkait keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan uji tuntas hingga mitigasi risiko. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dijalankan maka Indonesia dapat memanfaatkan forum JTF sebagai wadah diskusi terkait sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dengan adanya beberapa saran praktis ini, penulis berharap Indonesia mampu terus mempertahankan daya saing minyak kelapa sawitnya di Pasar Uni Eropa. Penulis percaya bahwa upaya kerja sama antar pemangku kepentingan akan menjadi awal dari keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.

- II. Apakah benar adanya inisiasi penundaan EUDR dan apakah keputusan tersebut merupakan hasil dari upaya diplomasi pemerintah bersama para pemangku kepentingan seperti GAPKI? Apabila iya, apa bentuk diplomasi yang dijalankan?
- Belum ada pernyataan resmi, namun Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa sendiri menyampaikan keberatannya. Namun, betul akan lebih baik jika ditunda sampai masalah dalam negeri tuntas.
- III. Apa saja upaya diplomasi yang cukup berhasil memengaruhi kebijakan EUDR?
- Adanya forum CPOPC dan *Joint Task Force* yang menjadi peluang bagi Indonesia dalam menghadapi kebijakan EUDR. Upaya diplomasi yang cukup berhasil adalah audiensi dengan dubes Uni Eropa sehingga deforestasi *cut off* ditentukan sebelum Desember 2020, karena sebelumnya jauh lebih lama dari itu, namun GAPKI sampaikan bahwa hal itu akan sangat merugikan